

Ringkasan
Kebijakan 2 EFI

Fasilitas FLEGT UE

Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan – Pendekatan Uni Eropa



Upaya ini dibiayai oleh Uni Eropa



Ringkasan Kebijakan 2 EFI
2008





Rencana Tindakan FLEGT melengkapi agenda pengelolaan sumber daya alam dan agenda tata kelola, dua persoalan utama yang dihadapi oleh pembangunan dan Uni Eropa. Kesepakatan Kemitraan Sukarela merupakan contoh yang sangat baik mengenai visi kami mengenai kerja sama pembangunan karena mencerminkan komitmen UE bersama negara-negara berkembang untuk menentang pembalakan liar dan meningkatkan tata kelola yang baik. Ini juga merupakan sebuah dialog politik yang telah diperbarui mengenai masalah-masalah strategis tersebut, sehubungan dengan prinsip-prinsip utama kepemilikan, karena kesepakatan ini bersifat sukarela, serta kemitraan, seperangkat langkah-langkah yang disepakati bersama, dan, dari sisi UE, merupakan suatu bentuk kerja sama yang sangat baik antara Komisi Eropa dan Negara-negara Anggota. Dengan adanya publikasi ini, Anda akan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai FLEGT maupun manfaatnya untuk pembangunan.

*Stefano Manservigi
Director General DG Development, European Commission*



Apa itu EU FLEGT?

Pembalakan liar berdampak menghancurkan terhadap sebagian sisa hutan dunia yang paling berharga. Efeknya terhadap lingkungan hidup mencakup penggundulan hutan, punahnya keanekaragaman hayati dan meningkatnya emisi gas rumah kaca. Dampak secara langsung terhadap penduduk antara lain adalah konflik dengan penduduk pribumi dan dengan penduduk setempat, kekerasan serta penindasan atas hak-hak azasi manusia, meningkatnya korupsi dan memburuknya kemiskinan. Bank Dunia memperkirakan bahwa pihak pemerintah di beberapa negara termiskin di dunia mengalami kerugian lebih dari US\$15 milyar per tahun sebagai akibat pembalakan liar – uang tersebut seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan penduduk mereka.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pada tahun 2003 Komisi Eropa mengumumkan Rencana Tindakan Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan, yang menguraikan serangkaian langkah-langkah yang dapat diambil oleh Uni Eropa dan Negara-negara Anggotanya untuk menangani pembalakan liar di hutan-hutan di seluruh dunia.



Environmental Investigation Agency



Marc Parren / Tropenbos International Congo-Basin Programme

Masyarakat setempat di Kawasan Cagar Hutan Tano Offin, Ghana.

Kayu gelondongan dari Rusia di sebuah Depot Kayu di kota Suifenhe, Cina. Menurut laporan, persentase kayu gelondongan ilegal tinggi.

Untuk pertama kalinya, Rencana tersebut secara eksplisit mengakui bahwa UE adalah konsumen utama produk kayu dari kawasan-kawasan yang memiliki tingkat tertinggi dalam hal ilegalitas dan tata kelola yang buruk dalam sektor kehutanan, dengan demikian menjadi pasar yang potensial untuk kayu ilegal. Permintaan dari Eropa dianggap sebagai penggerak yang signifikan untuk ilegalitas kayu, maka, Komisi Eropa merasa terdorong untuk menelaraskan metode kehutanan tradisionalnya

agar sesuai dengan fokus paralel yaitu mengendalikan pasar yang berpotensi menerima kayu ilegal di dalam ruang lingkup UE.

Rencana Tindakan FLEGT merupakan tanggapan terhadap berbagai komitmen politik tingkat tinggi yang dibuat oleh UE, Negara-negara Anggotanya serta pemerintah-pemerintah negara mitra sebagai bagian dari Program G8 mengenai Hutan, maupun Konferensi para Menteri regional mengenai Penegakan Hukum dan Tata Kelola Sektor Kehutanan (FLEG), yang

difasilitasi oleh Bank Dunia.¹

Sasarannya bukan sekadar mengurangi penggundulan hutan ilegal, tetapi berupaya menangani kemiskinan dengan mendukung tata pemerintahan yang baik di negara-negara yang menjual kayu kepada UE. Dengan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab di Eropa lebih suka membeli kayu dari produsen yang mematuhi peraturan setempat, yang membayar kayu yang mereka tebang dan bertindak dengan cara yang bertanggungjawab

¹ Untuk informasi lebih lanjut silakan lihat: Deklarasi Menteri mengenai Penegakan Hukum dan Tata Kelola Sektor Kehutanan Asia Timur (Bali, 2001); Deklarasi Menteri mengenai Penegakan Hukum dan Tata Kelola Sektor Kehutanan Afrika (Yaoundé, 2003) dan Deklarasi Menteri mengenai Penegakan Hukum dan Tata Kelola Sektor Kehutanan Eropa dan Asia Utara (St Petersburg, 2005)

“

Rencana Tindakan FLEGT bisa berbuat banyak untuk membalikkan efek pembalakan liar yang begitu merusak, selama UE mempertahankan kemauan politik untuk menggunakannya mengatasi aspek sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang negatif dalam perdagangan kayu. Langkah pertama adalah membuka ruang politik bagi kelompok yang terkena dampak paling parah oleh masalah-masalah yang berhubungan dengan pembalakan liar seperti korupsi, tata pemerintahan yang buruk dan kemiskinan. Memastikan terjadinya suatu dialog nasional yang murni harus menjadi inti dari program ini. Jika berhasil, maka metode FLEGT bisa menjadi tindakan pertama untuk mengatasi penyebab utama yang mendasari pengrusakan hutan.

Iola Leal

FERN – Hutan dan Jaringan Sumber Daya Uni Eropa (the Forests and the European Union Resource Network)

“

Kepada perusahaan-perusahaan pengimpor di UE, Rencana Tindakan FLEGT menawarkan sebuah sistem yang masuk akal, pragmatis dan kokoh untuk memastikan legalitas setiap kayu, tetapi khususnya kayu tropis, yang diimpor ke UE. Ini menyumbat celah yang ada dan meningkatkan keefektifan langkah-langkah sukarela yang sudah ada saat ini, yang didesain untuk melakukan hal yang sama. Dengan mematuhi aturan-aturan pemberian izin ini, maka banyak perusahaan pengekspor akan siap mewujudkan perubahan-perubahan yang diperlukan pada usaha mereka untuk mencapai tujuan akhir pencarian sumber dan pasokan yang berkelanjutan. Sungguh menggembirakan melihat begitu banyak negara yang telah dicakup oleh FLEGT, meskipun kita ingin melihat lebih banyak lagi, karena adanya sebuah gelanggang yang rata akan menghasilkan persaingan produk berdasarkan mutu dan pelayanan dan harga yang adil; bukan berdasarkan harga yang dilemahkan oleh kayu ilegal yang memasuki rantai pasokan.

John White

Chief Executive, UK Timber Trade Federation

terhadap penduduk miskin maupun lingkungan hidup di daerah setempat, maka masalah ini mulai dapat diatasi.

Maka, Rencana ini bertujuan mengembangkan pasar produk legal di Eropa, mendorong sektor usaha dan konsumen untuk membayar biaya riil produksi kayu legal, ketimbang hanya mencari yang termurah dengan risiko dikorbankannya kepedulian sosial dan lingkungan hidup.

Untuk itu, Rencana Tindakan FLEGT memusatkan perhatian pada kebijakan perdagangan yang dikendalikan oleh UE, dan pada pembelian yang dilakukan secara bertanggung

jawab oleh pemerintah maupun importir kayu yang tergabung dalam Negara Anggota:

Kebijakan perdagangan UE:

- Mengembangkan kemitraan dengan negara-negara yang ingin mengatasi masalah ilegalitas dalam sektor kehutanan mereka dan ingin membuktikan bahwa produk-produk kayu yang mereka ekspor ke UE memang legal;
- Menyusun peraturan perundang-undangan yang mendorong para importir untuk memikul tanggung jawab atas asal-usul kayu yang mereka beli; dan,

Pembeli yang termasuk dalam Negara Anggota:

- Mendorong pemerintah Eropa untuk membeli kertas, kayu bangunan, perabot kantor dan hasil-hasil hutan lainnya dengan cara yang legal dan berkelanjutan.
- Menyadarkan perusahaan-perusahaan di UE akan tanggung jawab mereka untuk membeli kayu dengan cara yang legal dan berkelanjutan, serta membantu mereka mengembangkan alat-alat yang memudahkan mereka untuk melakukannya.

Sam Lawson / Environmental Investigation Agency / Telapak



Rakit penuh dengan gelondongan kayu ramin ilegal (*Gonystylus* spp.) di Sungai Seruyan dekat Taman Nasional Tanjung Puting, Indonesia.



Kegiatan penebangan komersial telah dimulai lagi di Liberia empat tahun sejak terjadinya reformasi besar-besaran. Strategi Pengelolaan Kehutanan Nasional kami sekarang menyerukan agar hutan dikelola dengan cara yang membawa manfaat bagi masyarakat setempat, konservasi, dan kehutanan komersial (communities, conservation, and commercial forestry atau tiga C”). Pada tahun 2006, kami mensahkan Undang-Undang Kehutanan yang telah direformasi dan sejak saat itu FDA telah menerapkan standar-standar internasional dalam pengelolaan hutan, termasuk sistem pelacakan kayu yang dioperasikan oleh Grup SGS. Kami menyambut bantuan Eropa serta kerangka FLEGT dalam upaya menciptakan sektor kehutanan yang dinamis serta mendukung pasar yang bertanggungjawab pada saat yang demikian kritis bagi hutan kita.

*John T Woods
Direktur Pelaksana, Otoritas Pengembangan Hutan
Liberia*

Foto beresolusi tinggi ini yang memperlihatkan bagian utara Republik Kongo diambil pada tanggal 27 Juni 2002 oleh satelit komersial Ikonos. Bagian yang lebih lebar di sebelah atas menunjukkan jalan angkutan kayu berlumpur (garis berwarna oranye) dan berbagai jenis hutan yang berbeda di kawasan sekitar perbatasan daerah Sangha dan Likouala. Bagian di sebelah bawah adalah gambar close-up yang tidak hanya memperlihatkan sebagian jalan angkutan kayu, tetapi juga lokasi-lokasi penebangan (kawasan yang gundul karena pohon sudah dibabat habis) dan juga jalan sarad (jalan setapak yang dilewati untuk menyeret pohon yang ditebang ke arah jalan) Di sebelah kiri, masing-masing pohon atau beberapa bagian dari pohon yang ditumpuk jadi satu di jalan tampak seperti batang korek api. Teks dan gambar atas izin dari NASA.

Mengembangkan kemitraan dengan negara produsen

UE kini terus mengembangkan kesepakatan bilateral dengan negara-negara yang mengekspor produk kayu ke UE. Kesepakatan kemitraan ini bersifat sukarela bagi negara-negara pengekspor dan mengharuskan UE untuk membantu mereka meningkatkan pengurusan hutan: memperkenalkan sistem yang mengatur praktek-praktek kehutanan secara efektif; melacak hasil-hasil hutan dan memberi izin untuk ekspor ke UE. Apabila suatu negara telah menandatangani kesepakatan tersebut, artinya ia telah menyepakati suatu periode waktu untuk

mengimplementasikan sistem yang diwajibkan, dan setelah itu hanya kayu berizin dari negara tersebut yang akan diterima di perbatasan UE.

Yang menjadi dasar untuk pemberian izin ekspor tersebut adalah standar nasional untuk pengelolaan hutan, yang berakar pada undang-undang dan peraturan nasional dari masing-masing negara mitra. Ini mencakup perlindungan lingkungan hidup, aturan-aturan penebangan, pembayaran iuran, perdagangan kayu dan peraturan pengangkutan serta hak-hak milik, khususnya bagi masyarakat yang bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka.

Lembaga-lembaga yang menjadi inti kemitraan ini akan membantu memastikan supremasi hukum berdasarkan undang-undang sektor kehutanan, dan harus memudahkan perusahaan-perusahaan kayu yang bertanggung jawab untuk lebih cepat mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan yang bersertifikasi dengan mengurangi risiko persaingan menghadapi produk ilegal yang murah. Dan dengan membeli produk kayu berizin, maka perusahaan akan mengurangi risiko untuk harus berurusan dengan produk ilegal.

Namun, kesepakatan tersebut serta sistem transparan yang mendukung surat izin legalitas

“

Sektor kehutanan di Kamerun telah mengalami peningkatan besar dalam hal transparansi, yang merupakan hasil kerja sama antara pemerintah dengan salah satu pemantau independen dalam bidang penegakan hukum dan tata kelola sektor kehutanan. Pemerintah mengizinkan pemantau dari luar untuk memeriksa kegiatannya dan menerbitkan hasil penyidikannya. Hasil-hasil utama antara lain berkurangnya praktek ilegal oleh perusahaan-perusahaan penebangan yang selama ini bersembunyi dari catatan publik, dilaksanakannya penyidikan resmi terbaru mengenai korupsi di dalam Kementerian Kehutanan, serta peninjauan kembali dan pembatalan izin-izin penebangan serta sistem-sistem penegakan hukum yang kontroversial. Manfaat-manfaat demikian juga diharapkan dapat segera menyusul di Republik Kongo, dengan adanya bentuk kerja sama serupa yang telah dimulai baru-baru ini.

*Valerie Vauthier
Pemantauan Perolehan Sumber Daya. (REM)
Pemantau Hutan Independen, Kamerun*

nasional, bukan solusi cepat untuk sementara. Dalam kasus tertentu, mungkin perlu beberapa tahun untuk mengadakan perundingan dan kemudian mengimplementasikannya. Meskipun demikian, banyak pihak yang mengharapkan bahwa mekanisme ini, yang menggabungkan perdagangan dan bantuan, bisa berpotensi sebagai langkah signifikan untuk melindungi hutan yang terancam punah dan untuk membagikan manfaat pengelolaan hutan dengan cara yang legal dan berkelanjutan di negara-negara mitra.

Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendorong para importir untuk memikul tanggung jawab atas asal-usul kayu yang mereka beli

Karena sifatnya bilateral dan sukarela, maka kesepakatan kemitraan dan sistem-sistem pemberian izin yang akan dikembangkan di bawahnya, menghadapi sejumlah tantangan. Misalnya, mungkin saja ekspor kayu ilegal ke UE akan terus dilakukan melalui negara-negara yang tidak ikut menandatangani Kesepakatan Kemitraan. UE tidak dapat secara langsung menangani masalah ini karena terdapat aturan-aturan perdagangan internasional

yang ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), tetapi UE berupaya keras untuk mendorong kesadaran akan pentingnya memperoleh surat izin legalitas FLEGT dan membantu agar sistem ini dapat diterima lebih luas oleh Pemerintah dan sektor swasta.

Untuk meningkatkan kesadaran di antara perusahaan-perusahaan Eropa, Komisi Eropa telah berupaya mencari opsi-opsi legislatif yang didasarkan atas prinsip uji tuntas. Ini mewajibkan para pedagang kayu untuk mengimplementasikan prosedur-prosedur tertentu guna memastikan secara masuk akal bahwa produk-produk tersebut – baik yang

Eric Gevaert / Fotolia.com



Kata orangutan berasal dari bahasa Melayu dan Indonesia yaitu “orang” dan “hutan. Spesies orangutan sangat terancam punah di Sumatera dan terancam punah di Kalimantan, menurut data di Daftar Merah mamalia IUCN.



REM



Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPA) antara UE dan Malaysia di bawah RENCANA TINDAKAN FLEGT merupakan suatu kebijakan positif sebagai tanggapan terhadap kepedulian konsumen yang berubah di UE. Ini akan menjamin tersedianya akses pasar yang berlanjut untuk produk-produk kayu Malaysia yang dihasilkan secara sah ke dalam pasar UE. VPA juga akan memberikan jaminan kepada konsumen di UE bahwa hanya produk kayu yang dihasilkan secara sah dan memiliki Surat Izin FLEGT yang dapat memasuki pasar UE.

*Mr. Lee Ley Yew
Bortim, Malaysia*

Mitra sektor swasta untuk Rencana Tindakan Perdagangan Kayu (RTPK) UE

Missi kerja sama antara Kementerian Kehutanan Republik Kongo (MEF) dan Pemantau Independen REM, untuk menyelidiki kegiatan-kegiatan penebangan di konsesi Abala, yang diberikan kepada perusahaan SOFIA, Département des Plateaux, Republik Kongo, November 2007.

diimpor ke UE maupun yang diproduksi untuk kebutuhan dalam negeri – ditebang secara legal. Walaupun langkah-langkah yang diusulkan tidak secara eksplisit menjadikan bukti legalitas sebagai syarat penjualan, namun dengan keberadaannya maka mungkin sekali pembeli akan lebih terdorong mencari sumber kayu yang telah diverifikasi/ disertifikasi. Apabila telah disahkan, maka peraturan perundang-undangan ini juga akan menyelaraskan pasar UE dengan revisi baru-baru ini pada UU Lacey di AS yang menetapkan bahwa impor atau penjualan produk kayu ilegal termasuk dalam kejahatan federal.

Pengadaan produk-produk kayu oleh pemerintah

Banyak negara mempunyai rencana pengadaan publik berwawasan lingkungan hidup, yang mencakup standar untuk pembelian berbagai macam produk dan pelayanan. Di dalamnya termasuk beberapa negara anggota UE, dan sejumlah negara lain. Mereka menganut kebijakan untuk tidak membeli kayu dan produk-produk kayu selain yang ditebang secara legal dan/atau berkelanjutan.

Diperkirakan bahwa sampai 20% dari permintaan pasar terdiri dari pembelian

pemerintah, dan meskipun kebijakan-kebijakan tersebut baru diimplementasikan belakangan ini, fakta di dalam UE menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut telah menggerakkan pasar bagi produk kayu legal dan berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar sektor publik. Selain permintaan langsung dari pemerintah, perusahaan yang melayani kontrak publik sering memutuskan untuk mengalihkan seluruh rantai pasokan mereka ke produk-produk yang dipasok secara bertanggung jawab demi alasan efisiensi, sehingga meningkatkan dampak atas pasar secara total.

“

Tata kelola kehutanan yang bebas dari korupsi, taat hukum dan berkelanjutan sangat penting bagi pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan serta perlindungan lingkungan hidup dalam taraf yang lebih tinggi. Kesepakatan Kemitraan Sukarela meningkatkan keseriusan komitmen negara yang membutuhkan maupun negara penghasil untuk menangkal pembalakan liar serta perdagangan produk-produk kayu yang terkait. Transparency International memuji upaya Komisi Eropa untuk mengupayakan kesepakatan dengan negara-negara utama penghasil kayu dan mengharapkan pelaksanaannya secara efektif dan yang tak kalah pentingnya, pemantauan secara independen. Transparency International berharap agar kesepakatan-kesepakatan tersebut dapat mengatasi ancaman korupsi sebagai penyebab dan sekaligus akibat dari kegiatan-kegiatan hutan ilegal.

*Pascal Fabie
Direktur Regional untuk Asia Pasifik. Transparency International*

Baru-baru ini Komisi Eropa menerbitkan pedoman bagi pemerintah-pemerintah nasional di Eropa mengenai pembelian berwawasan lingkungan hidup, termasuk kayu. Disarankan agar pemerintah membeli kayu legal sebagai persyaratan minimum, dan mengutamakan kayu yang sifatnya berkelanjutan, bila ada.

Pembelian secara bertanggungjawab oleh perusahaan

Uni Eropa telah mendukung berbagai macam proyek, yang sering disampaikan melalui asosiasi perdagangan nasional. Proyek-proyek

tersebut menganjurkan para importir kayu untuk mengenali sumber kayu yang mereka beli, memahami hukum di negeri asal pembelian kayu, dan memastikan bahwa produk-produknya legal.

Aki / BigStockPhoto



Tanaman bawah yang lebat di hutan hujan Taman Nasional Bako, Sarawak, Malaysia.

Dave Currey / Environmental Investigation Agency / Telapak



Penduduk desa sedang membuat anyaman jerami untuk rumah mereka, Manggroholo, Papua Barat.



Fred Hoogervorst / Panos Pictures

Penebangan kayu dengan gergaji mesin di sebuah konsesi hutan di Kalimantan Timur, Indonesia.

Daftar Kata-Kata FLEGT

Kesepakatan kemitraan sukarela (Voluntary partnership agreements atau VPA)

Kesepakatan yang bersifat mengikat secara hukum antara negara mitra dengan Uni Eropa, yang mendukung perdagangan kayu legal yang diproduksi sesuai dengan standar legalitas yang ditetapkan melalui dialog multi-pihak, dan tunduk kepada audit independen.

Sistem-Sistem Jaminan Legalitas (Legality Assurance Systems atau LAS)

Sistem yang mengendalikan dan melakukan audit independen terhadap hutan produksi dan rantai pasokan kayu yang menuju ke pasar Eropa.

Kebijakan Pengadaan Publik (Public Procurement Policies atau PPP)

Juga dikenal sebagai kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Kebijakan Negara Anggota yang menetapkan persyaratan bagi para pejabat dan instansi pemerintah yang memiliki daya beli. Diperkirakan bahwa permintaan pemerintah mencapai hingga 20% dari pasar hasil hutan. Di bawah Rencana Tindakan FLEGT, Negara-negara Anggota dianjurkan agar mengembangkan kriteria untuk semua hasil hutan terkait, yang menjamin bahwa hasil hutan tersebut telah diverifikasi secara independen dan dinyatakan legal dan/atau berkelanjutan.

Pemantauan Independen

Pemantauan independen dalam konteks FLEGT dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan dan sistem peraturan hutan berfungsi secara efektif dan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam praktek pengendalian hutan serta menyingkapkan tindak kriminalitas hutan. Sebagaimana tersirat dari namanya, pemantauan ini dilakukan oleh organisasi yang tidak terlibat dalam peraturan mengenai eksploitasi hutan. Dalam konteks VPA, Pemantauan Independen menyediakan salah satu unsur yang penting dalam jaminan legalitas. Fokusnya adalah pemantauan terhadap sistem jaminan legalitas guna memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi seperti dimaksudkan: menyediakan audit sistemik dan biasanya tidak akan berfokus untuk mengidentifikasi satu demi satu tindak kejahatan hutan.

Para penulis: Fasilitas FLEGT UE

Penulis untuk korespondensi: Jade Saunders (jade.saunders@efi.int) | Para redaktur seri: Risto Päivinen, Ilpo Tikkanen dan Minna Korhonen

ISBN: 978-952-5453-42-3

© European Forest Institute 2008

Foto sampul: Niina Verkerk

Pernyataan disclaimer: Publikasi ini dibuat dengan bantuan Uni Eropa. Isi publikasi ini semata-mata merupakan tanggung jawab para penulis dan sama sekali tidak dapat dianggap mencerminkan pandangan Uni Eropa.



Ringkasan Kebijakan EFI



Informasi berbasis sains yang tidak memihak dan yang relevan dengan kebijakan mutlak perlu untuk pengambilan-keputusan yang sehat. Ringkasan Kebijakan EFI mengangkat berbagai masalah serta tantangan kebijakan mengenai hutan yang ada saat ini dan memberikan garis besar mengenai pilihan-pilihan tindakan untuk mengatasinya dengan bantuan riset.



EUROPEAN FOREST INSTITUTE

Torikatu 34, FIN-80100 Joensuu, Finland
Tel. +358 10 773 4300, Fax. +358 10 773 4377
www.efi.int

Institut Hutan Eropa (European Forest Institute) merupakan jaringan riset hutan terkemuka di Eropa. Ia adalah organisasi internasional yang didirikan oleh Negara-Negara Eropa untuk melakukan dan mengadvokasi riset hutan, serta meningkatkan jaringan riset hutan melintasi seluruh Eropa. Ia diakui sebagai titik kontak untuk informasi yang relevan dengan kebijakan dan tidak memihak mengenai hutan dan kehutanan.